

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau sumber lain

- Adikusuma M. A., & Heryanti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 275–290.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.16961>
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). *Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik*.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (17 Mei 2021). *Reformasi Penilaian IKPA Tahun 2021*. <https://DJPB.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/pengumuman/2839-reformulasi-penilaian-ikpa-tahun-2021.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (18 Juni 2021). *Langkah-langkah Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021*. <https://DJPB.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/2928-langkah-langkah-peningkatan-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-tahun-2021.html>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghazali Indonesia.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.

Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas*.

Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.*

Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan dan Perencanaan Nasional.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.*